

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan sumber daya yang sangat penting dalam siklus kehidupan, tetapi pemenuhan akan air bersih dan sanitasi masih merupakan masalah di seluruh dunia (Tseklevs et al., 2021). Diperkirakan bahwa sebanyak 0,5 hingga 3,1 miliar orang akan menghadapi kelangkaan air pada tahun 2050 (Gosling & Arnell, 2016). Pertumbuhan dan pola perilaku eksploitatif manusia berdampak terhadap meningkatnya jumlah pemanfaatan air, yang berakibat menurunnya ketersediaan sumber daya air (Bahrami et al., 2022). Sehingga menjadi masalah paling mendesak yang dihadapi oleh berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia.

Kelangkaan air bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi masyarakat di pedesaan. Menurut laporan Bappenas, ketersediaan air layak konsumsi di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis (Bappenas, 2020). Sementara itu, ketersediaan air layak konsumsi di Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan menjadi langka atau kritis pada tahun 2045. Kondisi ketersediaan air terus menurun, sedangkan kebutuhannya terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, data proyeksi kebutuhan air secara nasional terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini tabel data proyeksi

kebutuhan air secara nasional dari tahun 2019 sampai dengan 2029 berdasarkan jenis penggunaannya:

Tabel 1.1.1 Proyeksi Kebutuhan Air Nasional (Kementerian PUPR)

No	Jenis Penggunaan	Kebutuhan Air (m3/hari)		
		2019	2024	2029
1	Rumah Tangga	3691.6	4614.8	5719.64
2	Industri/Komersil	295.33	415.33	571.96
3	Sosial	553.74	692.22	857.95
4	Sub Total	4540.668	5722.352	7149.55
5	Kebocoran (10-20%)	726.51	1030.02	1429.91
6	Total (m3/hari)	5267.178	6752.372	8579.46
	Total (liter/detik)	60.96	78.15	99.30

Selanjutnya, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dari tahun 2014 hingga 2021, setidaknya 12,5 % wilayah perdesaan di Indonesia mengalami pencemaran yang berdampak pada penurunan kualitas air (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain mengalami penurunan kualitas, penurunan kuantitas air terjadi terutama di pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan rendah seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Bappenas, 2020). Tutupan hutan diprediksi akan semakin berkurang akibat deforestasi, yakni dari sebanyak 50 % dari luas lahan total Indonesia (188 juta hektar) di tahun 2017, menjadi hanya sekitar 38 % di tahun 2045 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, saat ini penduduk Indonesia berjumlah sekitar 270,21 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil sensus pada 2010. Bertambahnya populasi juga menjadi beban baru dalam penyediaan air bagi masyarakat. Selain itu, konsumsi air secara berlebihan, sistem pertanian yang tidak efisien, konflik kepentingan ekonomi, kekeringan

akibat perubahan iklim serta kerusakan ekosistem menyebabkan ketersediaan air semakin kritis (Arsyad & Rustiadi, 2008).

Dampak dari kelangkaan air ini menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi oleh desa diantaranya yaitu menurunnya produksi pertanian, sanitasi yang buruk sehingga menyebabkan meningkatnya resiko terserang berbagai penyakit (Islam et al., 2021). Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat adalah pelaksanaan program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program ini bertujuan menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Walaupun telah berjalan sejak tahun 2008, namun program Pamsimas masih menyisakan berbagai permasalahan yang hingga saat ini belum tuntas (Fitriyah, 2019; Meithasari & Subowo, 2016). Diantaranya permasalahan tersebut yaitu kurangnya pemerataan, keterbatasan anggaran, cakupan wilayah yang terlalu luas, serta banyaknya fasilitas pengelolaan air yang sudah tidak berfungsi lagi (Azmir, 2022; Yati et al., 2021). Selain itu, program Pamsimas hanya memberikan solusi kelangkaan air di tingkat hilir, sedangkan penyebab utama di tingkat hulu berupa kerusakan lingkungan, tidak masuk dalam sasaran program tersebut (Ahmad et al., 2021; Wicaksono, 2018). Dengan demikian, kelangkaan air di wilayah pedesaan masih saja terus terjadi hingga saat ini.

Oleh sebab itu, sebagai upaya dalam menghadapi berbagai masalah lingkungan yang salah satu dampaknya menyebabkan masalah kelangkaan air di pedesaan, maka pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengambil langkah strategis dengan memasukan SDGs kedalam tujuan pembangunan di pedesaan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa guna mempercepat penanganan berbagai masalah degradasi lingkungan yang terjadi di pedesaan (Iskandar, 2020).

Berbagai penelitian mengenai implementasi SDGs Desa dalam upaya pengelolaan lingkungan menyimpulkan bahwa dengan memasukan SDGs Desa dalam strategi pembangunan, diharapkan pemerintahan desa bisa memprioritaskan penyelesaian isu lingkungan, melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga memberikan dampak pada meningkatnya kesadaran akan pentingnya penanganan degradasi lingkungan yang terjadi di pedesaan (Permatasari et al., 2021; Sutrisna, 2021; Szetey et al., 2021). Pada beberapa penelitian lain misalnya, ditemukan bahwa upaya penanganan permasalahan lingkungan tidak bisa mengandalkan hanya salah satu pihak yaitu desa, tetapi perlu adanya kolaborasi dan sinergi mulai dari pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, hingga pemerintah daerah selaku pembina dan pengawas kebijakan (Luqmania et al., 2022; Muna et al., 2022; Robertua, 2022). Oleh sebab itu, berhasil atau tidaknya penerapan SDGs Desa sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ketersediaan sumber daya, kerjasama antar lembaga, dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola program (Nugroho et al., 2022; Ovitasaki, 2022; Ronaldo & Suryanto, 2022).

Selanjutnya, dari berbagai hasil penelitian yang dirangkum oleh Di Vaio dkk (2021) mengenai tren penerapan SDGs dalam menghadapi ancaman krisis air di berbagai negara, menemukan bahwa pentingnya membangun resiliensi dengan memprioritaskan tata kelola infrastruktur dan teknologi yang tepat, menyusun strategi mitigasi menghadapi krisis air bersih dengan melibatkan pemerintah lokal dan masyarakat, ditengah ancaman perubahan iklim, deforestasi, degradasi lahan dan pencemaran lingkungan (Di Vaio et al., 2021). Selanjutnya, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dkk (2022) terkait implementasi SDGs Desa dalam penanganan kelangkaan air di Indonesia menyimpulkan bahwa kawasan pedesaan dengan potensi bentang alam dan sumber daya manusia yang ada, menjadikan desa memiliki peluang strategis dalam mewujudkan ketahanan air, energi, dan pangan di Indonesia melalui pendekatan lintas sektor dan lintas batas secara terintegrasi (Nugroho et al., 2022). Oleh sebab itu, melalui integrasi SDGS Desa, diharapkan desa mampu membangun resiliensi menghadapi potensi perubahan kondisi lingkungan (Afifuddin, 2022).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, penulis menemukan bahwa masih minimnya literatur penelitian di Indonesia yang secara khusus membahas penerapan SDGs Desa dalam penanganan kelangkaan air di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, penulis menganggap perlu dilakukan kajian lebih jauh mengenai implementasi SDGs di tingkat desa, khususnya yang berkaitan dengan penanganan masalah kelangkaan air bersih di pedesaan. Hal ini penting untuk menjadi perhatian agar wilayah pedesaan tidak lagi mengalami berbagai

ancaman kelangkaan air bersih. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk pengelolaan sumber daya air pedesaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan laporan dari Kemendes PDTT rata-rata capaian seluruh tujuan SDGs Desa adalah sebesar 45.86%. Sedangkan implementasi SDGs Desa yang berkaitan dengan penanganan masalah air bersih dan sanitasi memperoleh capaian sebesar 51.22% (*Sistem Informasi Desa, 2022*). Oleh karena itu, melalui implementasi SDGs Desa diharapkan wilayah pedesaan mampu menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan, memprioritaskan isu-isu yang paling relevan dengan kondisi lingkungan pedesaan, melibatkan peran pemerintahan desa dan komponen yang ada didalamnya, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pada lingkungannya, serta membangun resiliensi menghadapi perubahan kondisi lingkungan,.

Beberapa potensi yang memengaruhi keberhasilan implementasi SDGs Desa diantaranya adalah kondisi lingkungan, ketersediaan sumberdaya, kerjasama antar lembaga, dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola program. Selain itu, pengelolaan kelangkaan air di pedesaan juga ditemukan berbagai kendala yang dihadapi diantaranya adalah terus terjadinya pencemaran, meningkatnya populasi, kerusakan alam, konsumsi yang berlebihan, tata kelola pertanian yang belum baik serta kekeringan akibat perubahan iklim.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan rumusan masalah yang diajukan penulis pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi SDGs Desa dalam penanganan kelangkaan air bersih di desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo?”. Desa Lembah Kuamang hingga saat ini terus menerus menghadapi masalah kelangkaan air bersih setiap tahunnya, terutama ketika memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, sejak tahun 2021 di desa tersebut memulai melaksanakan program SDGs Desa, khususnya untuk mengatasi persoalan kelangkaan air. Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan lebih lanjut menjadi 3 pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hasil yang telah dicapai program SDGs Desa hingga saat ini?
- 2) Bagaimana implementasi SDGs Desa dalam penanganan kelangkaan air bersih di pedesaan?
- 3) Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi SDGs Desa dalam penanganan kelangkaan air bersih di pedesaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi SDGs Desa dalam penanganan kelangkaan air bersih di pedesaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsing bagi pengembangan ilmu lingkungan, khususnya pelaksanaan penanganan

kelangkaan air bersih di desa melalui program SDGs Desa. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya di daerah-daerah lain.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada Pemerintah terkait implementasi SDGs Desa, mengukur kelemahan dan kekuatannya serta memberikan alternatif-alternatif strategi kebijakan dalam pelaksanaan SDGs Desa dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional.